

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan kontribusi dan driven pengembangan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja termurah. Dewasa ini bagi sebagian masyarakat berwisata merupakan bukan lagi suatu kemewahan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan wilayah yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah atau masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perluasan kesempatan kerja.

Salah satu sektor pembangunan bidang ekonomi yang telah mendapat perhatian pembangunan sejak awal ialah sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata tersebut dilaksanakan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi pariwisata nasional menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan dengan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan potensi kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi nasional diarahkan pada sasaran untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama masyarakat setempat mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Demikian pula aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan perwujudan dari

penyelenggara pembangunan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu setiap keputusan atau perumusan kebijaksanaan yang akan diambil oleh kepala daerah bersama aparat lainnya di daerah sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan antara lain :

1. Memperkenalkan atau mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
2. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pariwisata saat ini sedang dikembangkan dengan giat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pariwisata adalah dengan memperbaiki infrastruktur, baik itu yang berhubungan pariwisata itu sendiri maupun sarana prasarana untuk mencapai lokasi tersebut. Pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologi dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan khususnya dibidang ekonomi bagi masyarakat disekitar daerah wisata, dengan mengadakan fasilitas, pengembangan pemanfaatan secara optimal dan pemeliharaan pariwisata secara berkelanjutan ini dapat mengembangkan pariwisata di Kabupaten Belu serta menjaga budaya

daerah agar tetap terlestarian. Kegiatan pembangunan nasional yang multidimensional ini menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional, yang diharapkan sebagai kekuatan pembangunan yang handal. Pembangunan nasional yang dimaksud yang dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-sumber potensi kepariwisataan nasional sehingga menjadi komoditi ekonomi guna memperbesar devisa negara aspek lain adalah memperluas dan memungkinkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam membangun daerah serta memperkenalkan alam dan nilai budaya masyarakat setempat upaya mengembangkan potensi alam yang beraneka ragam mengacu kepada kebijakan pariwisata nasional pelaksanaannya dijabarkan secara mendetail, dalam kebijakan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan, tidak lain karena dampak yang mampu ditimbulkan dari aktivitas pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi sosial, maupun lingkungan. Hal ini perlu diperhatikan dalam pengembangan objek wisata adalah melaksanakan promosi pariwisata lewat pelaksanaan berbagai kegiatan penting dan even-even lokal dan regional dilokasi tersebut sedangkan pemerintah kabupaten belu dapat melaksanakan pemantaun dengan model lewat MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang disepakati antara masyarakat setempat, pemerintah maupun dengan lembaga DPRD.

Tabel 1.1

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan
Domestik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

Tahun	M mancanegara	Wisatawan Domestik	Total	Persentase M mancanegara (%)	Persentase Domestik (%)
2016	2.527	8.691	11.218	23	77
2017	4.135	14.170	18.305	23	77
2018	3.693	6.706	10.345	35	65
2019	6.930	12.899	19.829	35	65
2020	572	4.650	5.222	11	89

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 wisatawan domestik berjumlah 8.691 dari jumlah wisatawan 77% lebih dominan daripada wisatawan mancanegara yang berjumlah 2.527 dari jumlah wisatawan 23%. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan mengalami penurunan yang signifikan wisatawan domestik berjumlah 4.650 dari jumlah wisatawan 89% dan wisatawan mancanegara berjumlah 527 dari jumlah wisatawan 11%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan jumlah wisatawan domestik lebih banyak dibandingkan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisata akan menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pengembangan desa wisata.

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu didasarkan pada “**Zona Pariwisata Laliman (lakaan, Lidak, Manderu)**” yaitu ; (1) Zona lakaan meliputi Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat, dan Tasifeto Timur dengan fokus pada kegiatan pariwisata budaya dan religius ; (2) Zona Lidak meliputi Kecamatan Atambua Kota, Atambua Barat, Atambua Selatan dan Kecamatan Kakuluk Mesak dengan fokus pada kegiatan pariwisata kuliner,

cinderamata dan wisata bahari ; (3) Zona Mandeu meliputi Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk, dan Kecamatan Nanaet Duabesi dengan fokus kegiatan pada pariwisata alam dan budaya.

Salah satu wisata bahari yang terkenal di Kabupaten Belu adalah Pantai Pasir Putih yang berada di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Dari pusat Kota Atambua, jaraknya sekitar 30 km. Seperti namanya, berkunjung ke sini, akan disugahi hamparan pasir putih di sepanjang pantai. Pantai yang bersih ini memiliki air laut yang jernih dengan topografi pantainya yang dangkal. Pemerintah Kabupaten Belu telah mengembangkan dan meresmikan Destinasi Digital di sekitaran pantai pasir putih di Desa Kenebibi. Kegiatan seperti itu sangat menarik wisatawan mancanegara seperti negara tetangga Timor Leste dan wisatawan lokal untuk berkunjung ke pantai pasir putih. Perkembangan pariwisata menggambarkan salah satu kapasitas ekonomi masyarakat yang perlu dimajukan guna menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan pedagang, disamping konsep pariwisata yang meliputi usaha pariwisata serta daya tarik wisata dan berbagai macam aktivitas lainnya. (Rulloh2007).

Perkembangan suatu daerah sangat ditentukan potensi andalan dan unggulan yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan adanya potensi wisata tersebut pemerintah Kabupaten Belu menunjukkan bukti nyata dengan diwujudkannya program-program upaya pembangunan objek dan daya tarik wisata serta merangsang masyarakat untuk membuka usaha yang mendukung pariwisata, guna memenuhi kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan di pantai pasir putih yang memiliki keindahan pantai yang sangat bagus. Fasilitas-

fasilitas yang terdapat di pantai pasir putih ada beberapa lopo, tempat bermain anak-anak, tempat sewa perahu, toilet, dan kamar mandi. Adanya pengembangan pariwisata ini diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai pasir putih dan juga bisa menambah penghasilan pedagang yang berjualan di sekitaran pantai.

Persaingan kunjungan wisatawan akan berdampak pada pedagang yang berada pada lokasi wisata tersebut. Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya bekerja dalam kurung waktu yang lama dan kurang teratur dibandingkan dengan pekerja formal, hal tersebut dilakukan oleh PKL karena ingin menambah penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kelangsungan usaha yang di geluti PKL. Sebagian PKL memilih berjualan di tempat keramaian seperti tempat objek wisata salah satunya tempat objek wisata pantai pasir putih yang menjadi barometer tujuan wisatawan di Desa Kenebibi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait perkembangan pariwisata sangat mengalami peningkatan yang signifikan, oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti tentang **“Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pantai Pasir Putih Di Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak kunjungan wisatawan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kawasan objek wisata pantai pasir putih?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha di kawasan objek wisata pantai pasir putih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dampak kunjungan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kawasan objek wisata pantai pasir putih.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha di Kawasan Objek Wisata Pantai Pasir Putih.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi tentang adanya perkembangan pariwisata terhadap pendapatan pedagang kaki lima.
2. Peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama dan menjadi sumber bagi pembaca.